



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: Studi Kasus  
Pasangan Poligami di Desa Kualu Kecamatan  
Tambang Kabupaten Kampar**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum*



**OLEH:**

**BUDI IRAWAN  
NIM: 11721101174**

**PROGRAM S 1**

**PROGARAM STUDY HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU**

**1442 H/ 2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “(TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI (Studi Kasus Masyarakat Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Yang Melakukan Poligami)”, yang ditulis oleh :

NAMA : BUDI IRAWAN

NIM : 11721101174

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Dzulkaidah 1442 H

25 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

MUTASIR, S.H., M.Sy  
NIK. 130217036



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI: Studi Kasus Pasangan Poligami Di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar”**, yang ditulis oleh:

Nama : **BUDI IRAWAN**  
 NIM : **11721101174**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 14 Juli 2021**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ujian Online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag**

Sekretaris  
**Mutasir, M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Aslati, M.Ag**

Penguji II  
**Drs. Arifuddin, M.Ag**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**UIN SUSKA RIAU**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**BUDI IRAWAN (2021) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami: Studi Kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang poligami yang dilakukan oleh pasangan poligami di Desa Kualu tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam Islam salah satu syarat wajib poligami adalah adil tetapi praktik poligami yang dilakukan oleh suami di Desa Kualu tidak sepenuhnya memenuhi syarat tersebut. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep adil dalam poligami oleh pasangan poligami di Desa Kualu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami oleh pasangan poligami di Desa Kualu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan study pustaka dari buku-buku referensi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan dari penelitian ini adalah suami yang melakukan poligami dan istri yang di poligami. Teknik penulisan menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data dan menerangkan gambaran dari keterangan secara umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan data-data permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep adil dalam poligami yang dilakukan oleh pasangan poligami di Desa Kualu tidak secara keseluruhan diterapkan oleh suami yang berpoligami artinya mereka menelantarkan yang satu dan lebihkan yang lain yaitu mereka lebih condong dengan salah satu istrinya dan tidak menerapkan keadilan selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami yang dilakukan oleh pasangan poligami di Desa Kualu tidak secara keseluruhan diterapkan oleh suami yang berpoligami berdasarkan syariat Islam.

Kata kunci: Adil, Poligami, Hukum Islam



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar IMelihat dan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil dalam Poligami: Studi Kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Kepada yang tersayang dan tercinta Ibunda Ani Wati, Ayahanda Insar, kakak kandung Susi Fatmawati dan suami, Adik kandung Devi Parmawati, Bunga Lestari dan Aisyah Insani yang selalu mendokan kebaikan untuk penulis dan selalu memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, MA selaku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d selaku Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik dilingkungan UIN SUSKA Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Seketaris Jurusan HukumKeluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Bapak Ahmad Fauzi, S. HI, MA. selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan memotivasi hingga terselesaikan pendidikan dengan baik.

6. Bapak Mutasir, S. HI, M.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.

8. Kepada seluruh pegawai Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta rekan-rekannya yang telah memberikan pelayanan fasilitas literatur



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber data primer dan sekunder dalam pembuatan skripsi ini.

1. Kepada teman-teman satu lokal, satu jurusan, satu organisasi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selama ini sudah seperti saudara sendiri bagi penulis. Terimakasih yang telah menemani dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, arahan dan izin yang diberikan kepada Penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya, amin.

Pekanbaru, 01 Juli 2021  
Penulis

**BUDI IRAWAN**

**11721101174**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Kualu .....	17
B. Letak Geografis dan Demografis Desa Kualu .....	18
C. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kualu .....	19
D. Keagaam Masyarakat Desa Kualu .....	22
E. Pendidikan Masyarakat Desa Kualu .....	23
F. Kesehatan Masyarakat Desa Kualu .....	24
G. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kualu .....	25
H. Budaya dan Adat Masyarakat Desa Kualu .....	26
I. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu .....	29
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI</b>	
A. Pengertian Poligami .....	31
B. Dasar Hukum Poligami .....	34
C. Syarat-syarat Poligami .....	44
D. Alasan-alasan Berpoligami .....	49
E. Hikmah Poligami .....	52
F. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami Studi kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu .....	76
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami Studi Kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

1. Daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kualu (II.1)
2. Pola Penggunaan Lahan di Desa Kualu (II.2)
3. Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian (II.3)
4. Jumlah Penganut Agama di Desa Kualu (II.4)
5. Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kualu (II.5)
6. Struktur Aparat Desa Kualu Periode 2015-2021 (II.6)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>1</sup> Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Allah SWT. berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صُلْحًا لَّنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur” (Q.S. AL-‘ARAAAF ayat 189).<sup>2</sup>

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikah agar bisa menyalurkan

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 5.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), h. 253.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasrat seksualnya dengan halal dan tentunya terhindar dari fitnah dan perzinahan, Dan juga dengan menikah mereka akan bisa mempunyai keturunan yang membuat kesempurnaan di dalam keluarga tersebut. Namun adakalanya suami berkeinginan untuk mempunyai istri lebih dari satu mungkin kerna hasrat seksualnya yang tinggi, maka Islam memberikan solusi yaitu umatnya (laki- laki) muslim, untuk menikahi perempuan lebih dari seorang, yang disebut dengan poligami. Dalam ajaran Islam membolehkan berpoligami sampai empat orang istri tentunya dengan syarat yang sangat ketat salah satunya dapat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Sebagaimana di dalam Al- Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa ayat 3).<sup>3</sup>

Praktek poligami sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, bahkan telah menjadi tradisi diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arab. Sebelum Islam datang poligami memiliki bentuk yang tak terbatas, setelah Islam datang lalu mendapati pelaksanaan poligami tanpa aturan dan batasan, dan tampak tidak manusiawi. Maka Islam pun mengaturnya, mendesain ulang, serta menjadikannya terapi dan obat bagi kondisi-kondisi “darurat” yang diderita masyarakat.<sup>4</sup>

Selama ini praktek poligami menjadi masalah yang sangat kontroversial dalam Islam, bahkan poligami adalah topik yang selalu menjadi perbincangan baik langsung maupun tidak langsung. Kalau kita sudah membahas poligami, tentu bahasan itu tidak lepas dari konsep keadilan. Keadilan dalam poligami sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang sangat menarik untuk dibicarakan. Meskipun, sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan.

Berbuat adil seolah sudah menjadi konsensus (ijma' umat), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami. Itulah sebabnya, sejauh ini sudah banyak karya ulama baik klasik maupun modern yang membahas tentang keadilan dalam poligami dalam karya-karya mereka, akan tetapi konsep yang mereka buat dan kemukakan masih banyak terdapat kritikan-kritikan dan menjadi perdebatan di antara ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya. Tidak hanya itu, beberapa literatur dan riwayat mengenai keadilan dalam poligami yang sudah terlanjur dijadikan “alat” legitimasi banyak di antaranya, tidak memiliki sumber yang akurat (dapat

---

<sup>4</sup> M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008), h. 194.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercaya).<sup>5</sup>

Syariat Islam memandang penerapan dari konsep adil dalam berpoligami merupakan tindakan hukum yang bukan saja berakibat di dunia, tetapi harus dipertanggungjawabkan pelakunya di akhirat. Para ulama mazhab juga telah bersepakat bahwa syarat diperbolehkannya poligami adalah kemampuan suami berlaku adil di antara para istrinya. Walaupun terdapat sedikit perbedaan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam hal pembagian hari. Namun demikian pada prinsipnya ulama mazhab sepakat bahwa suami yang melakukan poligami harus berlaku adil terhadap para istrinya.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan sifat adil di atas, maka setiap suami yang melakukan poligami harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Ketentuan berpoligami di Indonesia telah di atur Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 UndangUndang Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Cendana, 2006), h. 269.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2, alih bahasa Imam Gazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 52.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang (suami) karena adanya sebab/alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi.

Di dalam KHI pasal 57 dijelaskan bahwa alasan-alasan bagi suami berpoligami adalah :

1. Istri tidak dapat melayani suami seperti pada umumnya.
2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>7</sup>

Dengan merujuk uraian Kompilasi Hukum Islam di atas tampak jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Lagi pula, jika dihayati dengan hati yang jernih, mau tidak mau harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau berpenyakit bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi itu lebih merupakan takdir dari Tuhan, karena tidak ada istri yang menginginkan dirinya mandul atau berpenyakit. Semua perempuan tentu menginginkan dirinya sehat, hanya saja tidak semua keinginan manusia dapat terwujud sesuai harapan. Akan tetapi pada prakteknya, pelaku poligami tidak berdasar pada hal tersebut bahkan justru pelaku menyimpangkan hal-hal tersebut. Secara jasmani dan rohani sang istri

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2008), h. 89.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dapat melakukan seluruh kewajibannya, baik mengurus suami maupun mendidik anak-anaknya.

Sekiranya apa yang digambarkan di atas itu benar-benar terjadi, disinilah muncul suatu konflik antara teori dan praktek, artinya syarat-syarat yang telah disebutkan diatas tadi sama sekali tidak dijadikan acuan orang dalam melakukan poligami. Perkawinan poligami tidak dilakukan berdasar pada alasan-alasan yang ditentukan oleh perundang-undangan, melainkan karena alasan-alasan lain termasuk untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja. Seseorang bisa saja membuat alasan dengan menganggap pasangannya tidak mampu memberikan kepuasan batin.

Di Desa Kualu terdapat para suami yang melakukan poligami lantaran mereka menganggap dirinya mampu berlaku adil sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Namun kenyataannya terdapat tindakan pelaku poligami yang kerap kali tidak berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya dengan mengistimewakan salah satu dari istri-istrinya yaitu dengan cara menelantarkan yang satu dan melebihkan yang lain, diantaranya suami cenderung memberikan nafkah lebih kepada salah satu istrinya baik itu dalam hal pembagian belanja bulanan, pakaian, tempat tinggal maupun dalam hal pembagian waktu gilir. Hal ini menyebabkan gunjingan dikalangan masyarakat dan membuat warga tidak nyaman. Sehingga menimbulkan pandangan yang berbeda mengenai konsep keadilan yang ada didalam poligami.

Berangkat dari kejadian di atas maka penerapan konsep adil yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan oleh para suami yang berpoligami di Desa Kualu tidak secara keseluruhan di terapkan sesuai dengan syariat Islam, sehingga penulis tertarik untuk memilih objek pembahasan yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil dalam Poligami: Studi Kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**.

#### Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, penulis membatasi persoalan ini hanya tentang Tinjauan Hukum Islam yang dikemukakan oleh para imam mazhab, beberapa ulama-ulama klasik lain dan ulama-ulama kontemporer lainnya yang mereka mayoritas sepakat terhadap Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami Oleh Pasangan Poligami di Desa Kualu kecamatan tambang Kabupaten Kampar. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan.

#### Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami Oleh Pasangan Poligami di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Adil Dalam Poligami Oleh Pasangan Poligami di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami oleh Pasangan Poligami di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar!
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami oleh Pasangan Poligami di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar!

### E Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan yang lebih luas mengenai betapa pentingnya berlaku adil oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya terkhusus bagi suami yang berpoligami, Penelitian ini bisa memberikan tambahan khazanah bagi ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmiah dalam disiplin Ilmu Munakahat dan memberikan kontribusi ilmiah pada Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Kualu yang melakukan poligami, supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai keadilan dalam poligami, agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan tersebut.
- b. Sebagai pegangan dan pandangan dalam berpoligami sehingga nantinya diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani terbentuk



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.

### Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metode memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Karena ditempat tersebut banyak ditemukan kasus poligami.

#### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah suami yang melakukan poligami, sedangkan Objek penelitiannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami oleh pasangan poligami desa kualu.

#### 4. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian, dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi informan pada penelitian penulis adalah kepala keluarga yang melakukan poligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang berjumlah 5 kepala keluarga.

5. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti. Sumber data primer adalah kepala keluarga yang melakukan poligami dan istri yang dipoligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Data Scunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi. Dalam hal ini yang digunakan penulis adalah buku-buku tentang poligami dan buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang paling falid dan akurat dari subjek penelitian, maka penulis menggunakan instrument.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pegumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditemukan di lapangan.<sup>8</sup> Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan yaitu di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber data.<sup>9</sup> Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada kepala dan anggota keluarga yang melakukan poligami mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Studi pustaka

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

7. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara

<sup>8</sup> Ibal Jasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.186

<sup>9</sup> Bambang Prasetyo. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).cet ke-6. H.183





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

**8. Metode Penelitian**

Setelah data terkumpul dan valid, penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

**Penelitian Terdahulu**

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti telah mencari beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan ini. Hal ini dilakukan sebagai titik tolak yang digunakan untuk pengabsahan penelitian. Sepanjang penelusuran yang telah peneliti lakukan tentang Poligami terdapat beberapa peneliti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu yang mengkaji dan membahasnya, tetapi pada fokus permasalahan yang berbeda. Di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut

1. Attan Navaron tahun 2010, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, dengan judul “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab dan metodologi pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Attan Navaron adalah penelitian Attan Navaron hanya mengkaji permasalahan keadilan berpoligami menurut pemikiran M. Quraish Shihab dan metodologi yang digunakannya, artinya penelitian Attan Navaron masih bersifat teoritik. Sedangkan peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami oleh pasangan poligami di desa kualu kecamatan tambang kabupaten Kampar.

2. Abdul Khoir tahun 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul “Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, tanggapan masyarakat tentang praktik perkawinan poligami dan konsep adil dalam berpoligami menurut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (tinjauan kepustakaan), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan hukum Islam.

Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Abdul Khoir adalah penelitian Abdul Khoir hanya mengkaji permasalahan perkawinan poligami dan konsep keadilan berpoligami menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 serta respon masyarakat terhadap perkawinan poligami. Sedangkan penulis mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami oleh pasangan poligami di desa kwalu kecamatan tambang kabupaten Kampar.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, peneliti menyatakan sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian serupa dengan penelitian peneliti saat ini.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa saja yang melatarbelakangi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

## BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, pendidikan, agama mata pencarian di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

## BAB III: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi penjelasan yang membahas tentang Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat-Syarat Poligami, Alasan-Alasan Berpoligami, Hikmah Poligami Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil Dalam Poligami?

## BAB IV: PENELITIAN

Penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas tentang: Penerapan Konsep Adil dalam Poligami Studi Kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar? dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Adil





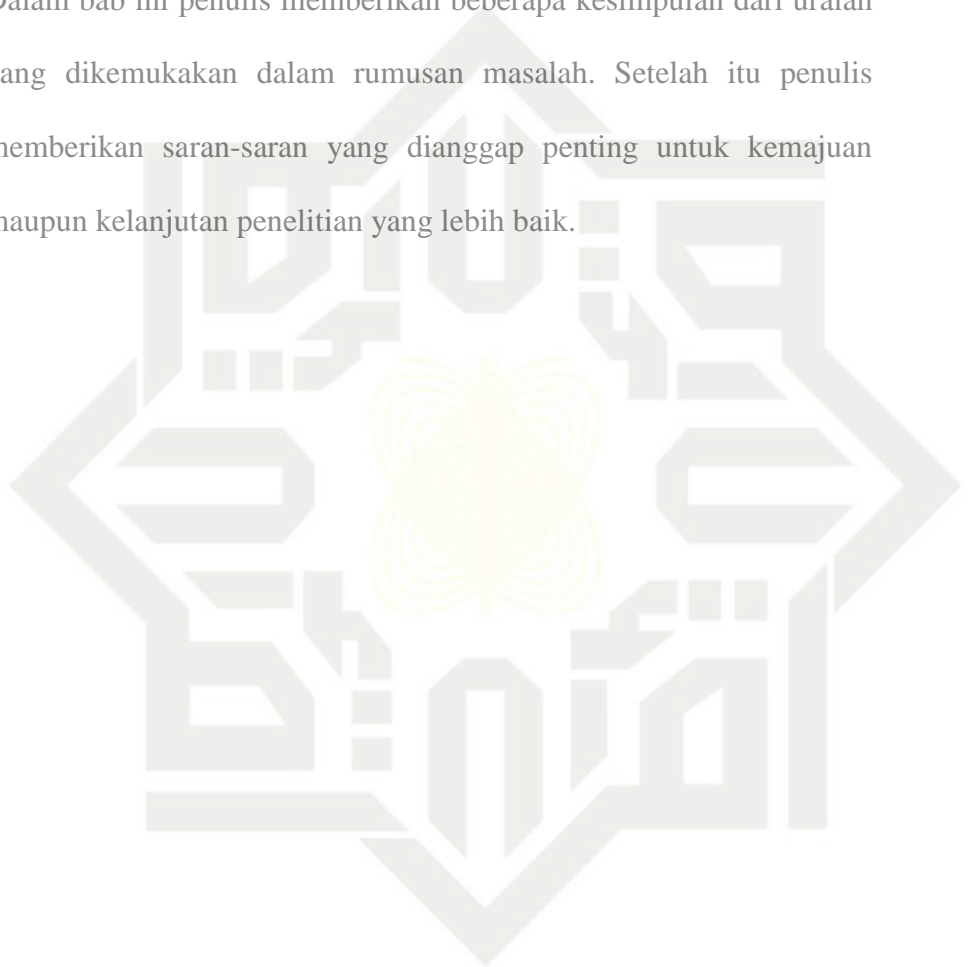
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Poligami Studi Kasus Pasangan Poligami di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar?

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA KUALU

#### A. Sejarah Desa Kualu

Desa Kualu adalah desa yang berdiri pada tahun 1978 hasil pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa Muda Kualu dan tahun 1979 baru devenitif Desa Kualu, dengan sejumlah RK yang menghuni sebanyak 3 kampung yaitu Kualu, Tanjung Kudu dan Durian Tandang dengan pusat pemerintahan di Kualu. Dinamakan Desa Kualu diambil dari kisah ikan tapah yang menjaga di muara sungai Kualu. Konon besar mulut ikan tapah tersebut sepanjang Alu (alat penumbuk padi) yang selalu muncul di muara sungai Kualu, ketika ikan tapah tersebut muncul ikan yang memiliki mulut yang besar memakan Alu yang mengapung di permukaan air, dan itu terlihat oleh masyarakat saat itu, tetapi tidak mengganggu manusia. Pertama kali Desa Kualu dipimpin oleh Wali Mudaa Kualu Hasan. N, dengan jabatan selama 11 tahun di bawah Kecamatan Kampar. Desa Kualu memiliki luas wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah Penduduk tahun 2021 sebanyak 20.875 jiwa tersebar di 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 48 RT.

Berikut beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Kualu:

**Tabel II.1**

**Daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kualu**

No	Masa jabatan	Nama	Jabatan
----	--------------	------	---------



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN-Suska Riau

1977-1981	Hasan N	Kepala Desa	
	Abusman	Sekretaris Desa	
1981-1989	Hasan N	Kepala Desa	
	Abusman	Sekretaris Desa	
1989-1999	Tantasir Hasyim	Kepala Desa	
	Mukhtar	Sekretaris Desa	
1999-2008	H. Anwar Hs	Kepala Desa	
	Mukhtar	Sekretaris Desa	
5	2002-2008	Jasri	Sekretaris Desa
6	2008-2014	Drs. Abukari, M.Pd	Kepala Desa
7	2014-2015	Jasri	Penanggungjawab Kepala Desa
8	2015-2021	Darmilis,SE	Penanggungjawab Kepala Desa

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2021.

#### B. Letak Geografis dan Demografis Desa Kualu

Desa Kualu memiliki luas wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 20.115 jiwa tersebar di 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 48 RT, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tarai Bangun dan Rimbo Panjang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar PTPN V.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Kenidai.

Jarak relatif Desa Kualu dari lokasi pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 23 KM
2. Lama jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 45 menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 68 KM
4. Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 1 jam

Luas wilayah Desa Kualu adalah 8.500 Ha. Pemanfaatan wilayah tersebut menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Pola Penggunaan Lahan di Desa Kualu**

No	Jenis Penggunaan	Luas lahan
1	Pemukiman	2.876 Ha
2	Pertanian/perkebunan	1.840 Ha
3	Ladang/tagalan	450 Ha
4	Hutan lahan kosong	1.735 Ha
5	Rawa-rawa	1.500 Ha
	Perkantoran	1 Ha
	Sekolah	9 Ha
	Jalan	84 Ha
	Lapangan olahraga	5 Ha
<b>Total</b>		<b>8.500 Ha</b>

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2021.

### Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kualu

Desa Kualu sebagai desa berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak yang tentunya masyarakatnya memiliki berbagai macam mata pencaharian. Adapun gambaran umum mata pencaharian Desa Kualu adalah sebagai berikut:





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Petani. Hampir setengah dari masyarakat di desa Kualu menjadi petani, dikarenakan mereka memiliki lahan yang cukup luas dan tidak menyewa, sehingga mereka bisa menanam apa saja yang bisa menghasilkan dari perut bumi. Baik itu kelapa sawit, pisang dan sayur mayur, ada dari mereka yang menjual langsung ke pasar dan ada pula yang menjualnya ke tengkulak.
2. Pertambangan. Desa Kualu yang berada di tepian sungai kampar juga mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat yang mendiami desa tersebut, misalnya tambang pasir dan krikil, walaupun tambang ini termasuk galian c dan ilegal namun sebagian anak muda di desa Kualu lebih memilih bekerja di pertambangan itu, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan perharinya lebih kurang Rp. 120.000. Pertambangan ini juga harus membayar ke desa sebagai pajak setiap alat yang mereka gunakan untuk menyedot pasir dan krikil (ponton). Setiap alat itu membayar pajak ke desa sebesar Rp. 50.000.000/tahun. Hasil pajak tersebut dikumpulkan dan di alokasikan ke beberapa pembangunan desa, seperti bangunan Serbaguna, Masjid, MDTA, dan Lain-Lain.
3. ASN. Masyarakat desa Kualu juga banyak yang bekerja di perkantoran, baik itu di perkantoran Agama maupun di Dinas yang lainnya.
4. Guru. Banyaknya sekolah yang berada di desa Kualu, juga mempunyai kesadaran mengabdikan diri bagi masyarakat desa kualu yang pernah merasakan bangku perkuliahan. Sehingga banyak diantara mereka yang



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengabdikan diri untuk menjadi guru, baik ditingkat paud sampai ke SMA Se-derajat.

- Bidan atau Perawat. Desa Kualu saat ini mempunyai beberapa posyandu yang berada setiap dusun di desa tersebut. Dan setiap dusun mempunyai bidan yang siap menangani masalah kesehatan masyarakat desa Kualu. Jika tidak tertangani maka akan dirujuk kerumah sakit besar yang berada di kota Pekanbaru.
- Buruh. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa Kualu, maka banyak pula diantara mereka yang menjual jasa dari tenaga yang mereka punya, baik itu di pabrik maupun di perkebunan.

Berdasarkan rekapitulasi data mata pencaharian penduduk di desa Kualu adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3**

**Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	ASN	276 orang
2	Bidan/perawat	41 orang
3	Buruh	296 orang
4	Guru	39 orang
5	Pedagang	1.987 orang
6	Pertambangan	13 orang
7	Petani	1.756 orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wiraswasta/swasta	1.198 orang
-------------------	-------------

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2021.

Berdasarkan tabel II.3 dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut mata pencahariannya didominasi bekerja sebagai pedagang dengan jumlah 1.702 orang diantaranya berdagang pisang, warung harian, tambang, ayur mayor dan lain sebagainya.

### D. Keagamaan Masyarakat Desa Kualu

Desa Kualu dalam hal keagamaan terdiri dari berbagai macam agama yaitu:

1. Agama Islam, sebagian besar masyarakat di desa Kualu beragama Islam, maka tidak heran hampir setiap RW mempunyai Masjid ataupun mushallah. Masjid dan Mushallah itulah menjadi pusat tempat belajar agama oleh masyarakat di desa Kualu, seperti pengajian (fiqih dan tafsir), tabligh akbar, dan MTQ. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pengurus masjid yang sekaligus juga sebagai tokoh agama, beliau menyampaikan walaupun banyaknya masjid dan mushallah yang berada di desa Kualu belum menimbulkan semangat untuk sholat berjamaah, bahkan belum sampai setengah dari masyarakat yang beragama Islam. Bukan hanya masjid dan mushallah, beberapa rumah juga menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar membaca Al-qur'an dan praktek ibadah. Seperti halnya di dusun I desa Kualu ada satu rumah yang sudah lama menjadi tempat anak-anak belajar mengaji, hampir 15 tahun lamanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Agama Kristen, pada dasarnya masyarakat asli desa Kualu semuanya beragama Islam. Namun banyaknya perumahan yang dibangun mengundang pendatang untuk menempati desa Kualu, baik mereka menyewa rumah ataupun langsung membeli rumah tersebut. Mereka bukan hanya beragama Islam akan tetapi juga beragama kristen. Dengan adanya mereka maka mereka membuat tempat ibadahnya masing-masing seperti gereja.

Gereja yang dibangun tidak diposisikan dimana penduduk asli desa kualu tinggal, namun mereka membangun gereja tersebut di dusun V Kampung Baru desa Kualu. Walaupun berbagai agama desa Kualu saat ini tetap hidup dalam kerukunan umat beragama, dan tidak ada kasus persekusian terhadap agama lain.

Berikut jumlah masyarakat penganut agama di Desa Kualu yaitu:

**Tabel II.4**  
**Jumlah Penganut Agama di Desa Kualu**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	19.896 orang
2	Kristen	219 orang
<b>Jumlah</b>		<b>20.115 orang</b>

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2021.

#### E. Pendidikan Masyarakat Desa Kualu

Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, desa Kualu mempunyai jenjang pendidikan yang mumpuni dalam bidangnya, dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai SMA se-derajat. Ini membuktikan bahwa anak-anak sekolahan juga banyak di desa Kualu, sehingga tersebarlah beberapa sekolah yang berada di desa kualu, bahkan dalam satu dusun saja bisa mempunyai sekolah sebanyak 3 sekolah berbagai jenjang disetiap dusunnya.

Sebagian kecil dari masyarakat desa Kualu lebih memilih menimba ilmu pendidikan di pondok pesantren yang berada di kualu dan juga beberapa kota dan kabupaten lainnya. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat desa Kualu lebih banyak memilih di kota Pekanbaru.

**F. Kesehatan Masyarakat Desa Kualu**

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kualu maka Pemerintah Desa Kualu telah membuat beberapa tempat kesehatan dan diadakan kegiatan posyandu dengan tujuan menekan kematian bayi, balita dan angka kematian ibu melahirkan. Adapun kegiatan yang lainnya yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan upaya pencegahan penyakit seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan keluarga berencana dan lain sebagainya. Selain itu telah terdapat juga beberapa tempat pengobatan milik pribadi atau swasta di Desa Kualu. Adapun jumlah sarana kesehatan di Desa Kualu sebagai berikut:

**Tabel II.5**

**Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kualu**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pustu Desa Kualu	1 unit

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Posyandu	8 unit
3	Praktik dokter	2 unit
4	Praktik bidan	10 unit

Sumber: Arsip Kantor Desa Kualu, 2021.

#### Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kualu

Tingkat kepedulian masyarakat desa Kualu terhadap sesama sangat tinggi, baik dalam suka maupun duka, beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi penulis amati di lapangan terhadap kepedulian anatar sesama:

##### 1. Kematian atau Kemalangan.

Bukan hanya saudara yang hadir dan ikut melayat jika terjadi kematian di masyarakat desa Kualu, namun antusias masyarakat turut ikut berduka jika salah seorang masyarakat yang meninggal dunia, dan sudah menjadi kewajiban mereka turut hadir dalam mendoakannya. Masyarakat di desa Kualu sudah menjadi kebiasaan jika terjadi kematian mengadakan tahlilan dan ziarah kubur (talqin) selama tujuh hari berturut-turut setiap sore dan malamnya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat desa Kualu mempunyai kepedulian sosial yang cukup tinggi.

##### 2. Gotong Royong

Hampir setiap bangunan serbaguna atau tempat ibadah (masjid) dibangun secara bersama-sama atau gotong royong. Tidak ada paksaan sebenarnya bagi masyarakat desa Kualu untuk mengikuti gotong royong tersebut, undangan hanya melalui himbauan dari pengurus masjid setiap jum'atan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan untuk biaya pembangunan juga di dapatkan dari masyarakat desa Kualu dan di kumpulkan ke bendahara masjid yang di percaya sebagai pemegangnya. Bukan hanya kalangan laki-laki saja, perempuan juga diikut sertakan dalam gotong royong ini, tetapi mereka hanya diikut sertakan dalam membawa makanan (kawa) untuk kaum laki-laki yang bergotong royong.

#### 3. Perkawinan

Suku menjadikan masyarakat desa Kualu yang beragam dan mempunyai ikatan yang sangat kuat antara suku, dalam perkawinan misalnya, setiap yang sesuku dengan mereka dan ingin melaksanakan perkawinan maka tokoh adat suku tersebut akan mengadakan musyawarah dan disampaikan kepada yang hadir bahwa anak kemanakan mereka yang ingin melaksanakan perkawinan, setelah itu tokoh adat akan mengutip sumbangan kepada yang hadir untuk membatu biaya perkawinan anak kemanakan mereka.

Hal ini membuktikan bahwa kepedulian masyarakat desa Kualu sangat tinggi terhadap sesama, bukan hanya dalam suku maupun duka, jadi tidak heran desa yang mempunyai lima dusun ini hidup dalam beragam dan tetap damai.

#### H. Budaya dan Adat Masyarakat Desa Kualu

Sudah menjadi budaya Kampar terkhususnya desa Kualu bermain calempong disetiap ada perkawinan, namun di desa Kualu untuk mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan digunakanla

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat musik yang dinamai *oguong* oleh masyarakat desa Kualu. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat desa Kualu ketika ada perkawinan. Budaya yang paling menonjol dimasyarakat desa Kualu hanyalah alat musik tradisional, bahkan dalam setiap acara adat alat musik itu selalu dimainkan.

Masyarakat asli desa Kualu menggunakan sistem matrilineal sebagai salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitasnya. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama *sumondo* (*ipar*). Oleh karena itu di desa Kualu sangat tidak dibolehkan kawin sesuku, jika ada yang melanggarnya maka kepala adat akan memberi sanksi kepada yang bersangkutan, seperti diasingkan dari desa tersebut atau membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kerbau dan dimakan bersama masyarakat. Masyarakat desa Kualu juga memiliki suku yang diambil dari garis nenek moyang ibunya, seperti:

1. Suku Domo Kunao di kepalai oleh Datuok Podo Jalelo.
2. Suku Domo Tuok Jalo di kepalai oleh Datuok Palimo Tunggang.
3. Suku Melayu di kepalai oleh Datuok Mantiko Mudo.
4. Suku Pitopang di kepalai oleh Datuok Sati Diajo.
5. Suku Piliong di kepalai oleh Datuok Ulak.

Kelima suku diatas dikepalai pula oleh seorang kepala suku yang lebih tinggi jabatannya, yaitu Datuok Panduko Sinaro, setiap kegiatan adat baik itu





### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan atau acara adat lainnya keputusan akhir akan disampaikan kepada ketua adat tersebut.

Kepala suku ini tidak dipilih oleh masyarakat atas musyawarah yang dilakukan, akan tetapi kepala suku dipilih langsung oleh tokoh adat yang lebih memiliki peran besar dalam adat, dan orang yang dipilih bukan orang yang biasa saja, namun yang dipilih adalah orang yang dinilai mampu untuk menjadi acuan dan contoh yang baik oleh masyarakat terkhusus suku yang dipimpinnya.

Walaupun dipilih oleh tokoh adat yang lebih besar, kepala suku ini tidak ada masa periode habis jabatannya, mereka dipersihlakan mengemban amanah ini sampai ia mampu dan bahkan sampai ia meninggal dunia, setelah itu barulah tokoh adat tadi memilih yang baru lagi dan akan diumumkan ke masyarakat, walaupun hanya dipilih oleh kepala adat yang besar saja, masyarakat tidak pernah memprotes atas pilihan itu, dan mereka bahkan menaatinya selagi apa yang disampaikan itu baik.

Sebenarnya banyak budaya dan kegiatan adat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Kualu, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Basiacuong.

Basiacuong merupakan tradisi yang turun menurun dikalangan masyarakat desa Kualu. Basiacuong seperti bait pantun yang saling menjawab atas kalimat yang dilontarkan oleh kepala suku ke kepala suku yang lain, biasanya basiacuong ini digunakan ketika ada acara perkawinan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bodua (syukuran) untuk menyuruh para tamu undangan makan dan juga pulang.

### 2. Maawuo Bonca Putek (Menangkap Ikan)

Maawuo bonca putek adalah kegiatan adat yang dilakukan ketika banjir sudah surut, bonca putek adalah sebuah nama tempat ikan seperti kolam ikan, tempat ini sudah menjadi tempat ikan kepunyaan masyarakat desa Kualu, apabila salah seorang masyarakat mengambil ikan di dalamnya pada waktu yang bukan semestinya, maka masyarakat tersebut akan didenda oleh tokoh adat dan masyarakat.

### 3. Mandi Balimau Kasai

Mandi balimau kasai merupakan suatu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat desa Kualu yang beragama Islam, karena acara ini dilaksanakan setiap ingin memasuki bulan suci ramadhan, sehingga dalam keyakinan mereka harus menyucikan diri, salah satunya dengan mandi balimau kasai. Sebelum memulai mandi balimau kasai, maka kepala adat menyirami setiap kepala suku unuk memulai mandi balimau kasai tersebut.

## I. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu

Wilayah Desa Kualu dibagi menjadi 5 dusun, 10 RW (Rukun Warga) dan 48 RT (Rukun Tetangga). Sedangkan pusat desa berkedudukan di Dusun I Kualu dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

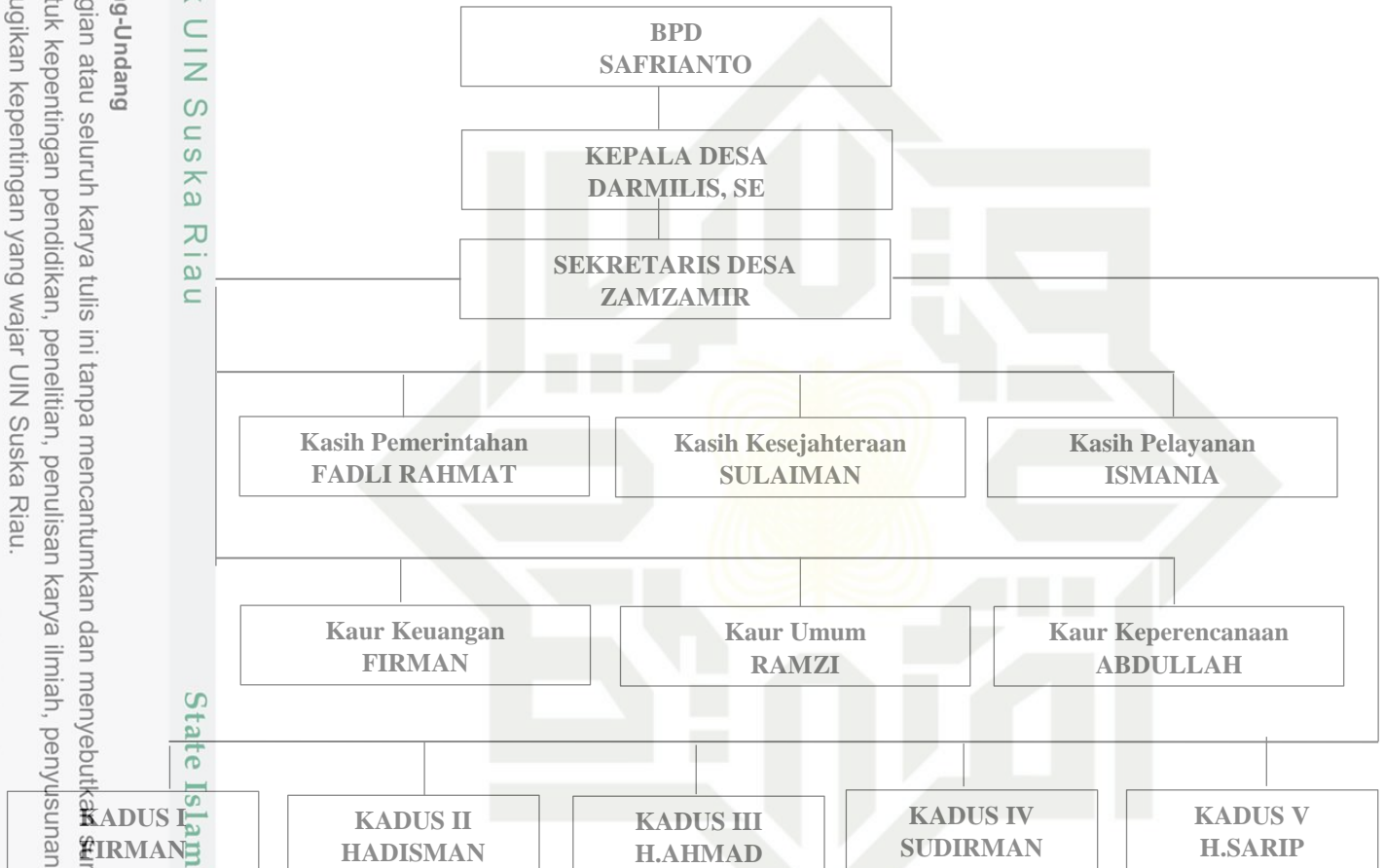
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut struktur aparat Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar:

**Bagan II.6**  
**Struktur Aparat Desa Kualu Periode 2015-2021**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa greek (Yunani), yang terdiri dari dua kata, yaitu *polus* dan *games*. *Polus* berarti banyak, sedangkan *games* berarti perkawinan, yang mana seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang dalam satu waktu.<sup>10</sup> Pengertian tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta yang menyebutkan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama, maupun sebaliknya, yakni poliadri, dimana seorang wanita memiliki atau mengawini sekian banyak laki-laki.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>.Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Sinar Baru Van Haove, 1984), h. 3736.

<sup>11</sup>.WJS. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 354.

<sup>12</sup>.Depdiknas, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet.Ke-III, h. 904.

<sup>13</sup> Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), h. 606.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ajaran Islam, istilah poligami diambil dari bahasa Arab “*ta’addud az-zawjat*” yang artinya beristri banyak lebih dari satu. Para sarjana hukum Islam telah sepakat mengatakan bahwa poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita.<sup>14</sup> Namun batasan umumnya yang dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Nisa’/4:3, sebagai dasar penetapan hukum poligami.

Dalam Fiqih Munakahat, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari syari’at Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>15</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa pengertian poligami menurut masyarakat umum lebih mengenal arti poligami dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang dengan mengikuti aturan dan syarat yang berlaku di tempat tersebut, baik dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu terpisah.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan

<sup>14</sup> Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 40.

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah tudingan yang mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti dia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan. Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana di atas, sebenarnya yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syara', pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

### B. Dasar Hukum Poligami

Poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan menentang, pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung oleh mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami secara ketat dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu.

Dalam Al-Qur'an ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami dan perintah untuk melakukan poligami oleh umat Islam adalah surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ  
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

<sup>16</sup> Jurnal Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Vol. Iii No 2 Juli-Desember, 2015.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (Q.S. An-Nisa’ ayat 3).<sup>17</sup>

Memaknai ayat di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Menurut Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah (W. 767M/150 H), Imam Malik (W. 795 M/179 H), Imam Syafi’i (W. 820 M/204 H), dan Imam Ahmad bin Hambal (W. 855 M/241 H), sepakat bahwa poligami itu *mubah* (boleh). Menurut mereka seorang suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi diperbolehkannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil diantara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.<sup>18</sup>

Para imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja, karena itu jauh lebih baik. Demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Sarakhsi (W. 1090 M) dalam kitab *al-Mabasut*, bahwa poligami dibolehkan dan seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat An-Nisa’ ayat 3 dan hadist dari Aisyah ra yang menceritakan perlakuan adil dari Nabi kepada istrinya, ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada para

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Log. Cit.*

<sup>18</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya.<sup>19</sup> Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, al-Kasani, ulama madzhab Hanafi, menulis tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan ini menjadi hak istri.<sup>20</sup>

Para ulama fiqh klasik juga berpendapat, bahwa Allah mengizinkan menikahi empat orang perempuan. Menurut mereka, walaupun diperbolehkan disini ditambah dengan kondisi yang tidak mungkin ditunaikan, yaitu keadilan dalam kasih sayang, perasaan dan cinta, namun selama kemampuan berbuat adil di bidang nafkah dan akomodasi bisa ditunaikan izin untuk berpoligami menjadi sesuatu yang bisa diperoleh. Alasan yang mereka kemukakan untuk mendukung ide ini adalah bahwa nabi sendiri pernah berkata hubungannya dengan ketidakmampuan berbuat adil dalam hal batin.<sup>21</sup>

Demikian juga pendapat para ulama tafsir, baik al-Thabari yang berpendapat bahwa poligami adalah diperbolehkan selama bisa berlaku adil. Sedangkan ulama yang lain yaitu Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Al-Razi (Al-Jashshash) yang juga intensif mengupas poligami, berpendapat bahwa poligami bersifat *mubah* (boleh). Diperbolehkannya ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil di antara para istri.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabasut* dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 44-45.

<sup>20</sup> Al-Imam 'Ala ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Sana'i fi Tarrif asy-Syara'i*, cet. Ke-I dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 45.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 99.

<sup>22</sup> Al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, t.t), h. 50.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga Zamakhsyari (W. 1144 M) berpendapat bahwa poligami adalah dibolehkan, bahkan pandangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi bagi laki-laki yang berbuat adil, bukan empat, sebagaimana pendapat ulama pada umumnya, tetapi sembilan. Dengan menjumlahkan dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan. Hal ini ditolak oleh Al-Qurtubi (W. 1273 M) di dalam kutipan Khoiruddin Nasution, dimana Harist Ibnu Qois yang mempunyai delapan orang istri, ketika masuk Islam Nabi menyuruh memilih empat orang di antara mereka dan menceraikan sisanya. Adapun menurut Syaukani (W. 1834 M) bahwa dengan turunya surat An-Nisa' ayat 3, yakni menghapus kebiasaan orang Arab pra Islam yang menikahi perempuan tanpa batas.<sup>23</sup>

Berbeda dengan ulama klasik, secara umum dapat dikatakan bahwa ulama pada era modern memperketat diperbolehkannya poligami, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkannya, meskipun dibalik keharaman tersebut masih disertai dengan kondisi yang memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Alasan pemikiran modern melarang menikahi perempuan lebih dari satu, atau kalaupun membolehkannya diikuti dengan berbagai syarat yang hampir tidak mungkin terpenuhi oleh suami, yaitu keadilan.

Sayyid Qutub (W. 1966 M) mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah,

<sup>23</sup> Kharuddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 87-89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.<sup>24</sup>

Yusuf al-Qardawi membagi hukum poligami menjadi 3 macam, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Boleh Berpoligami

Menurut Yusuf Qardhawi, ada 2 keadaan dimana poligami diperbolehkan yaitu: *pertama*, manusia yang kuat keinginannya untuk memiliki keturunan, akan tetapi istrinya tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. *Kedua*, laki-laki yang kuat syahwatnya, akan tetapi istrinya tidak kuat karena sakit atau karena haidnya terlalu lama dan sebab-sebab lainnya, sementara laki-laki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita.

b. Makruh berpoligami

Muslim menikah dengan satu istri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpukkan isi hatinya. Dengan demikian tepatlah suasana sakinah, mawaddah wa rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami-istri menurut pandangan Al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama mengatakan "orang yang mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, dimakruhkan baginya untuk menikah lagi. Karena hal itu

<sup>24</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*, alih bahasa oleh: As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 274-282 (cek ulang).

<sup>25</sup> Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah* (Bandung: Pustaka Imran, 2007), h. 177-183.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram.

#### c. Haram Berpoligami

Yaitu bagi orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah untuk istrinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil di antara kedua istrinya.

Namun demikian Amer Ali memberi catatan bahwa teori poligami digunakan jika suatu masyarakat yang menuntut adanya situasi yang menghendaki demikian, misalnya jumlah perempuan yang melebihi laki-laki.

Dengan ungkapan yang berbeda Fazlur Rahman menyatakan kebolehan berpoligami merupakan suatu pengecualian karena keadaan tertentu, sebab kenyataannya kebolehan tersebut muncul ketika terjadi perang, dimana banyak anak yatim dan janda yang ditinggal suaminya. Untuk itu ada dua solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an sehubungan dengan poligami.

*Pertama*, bahwa poligami yang terbatas hukumnya boleh. *Kedua*, kebolehan berpoligami diatur dengan sebuah moral berupa keadilan. Dengan ini, Al-Qur'an berharap agar suatu masyarakat berjalan sesuai dengan tuntutan zamannya, demikian Fazlur Rahman.<sup>26</sup>

Mu'ammal Humaidy juga menyatakan kesimpulan bahwa Islam bukan menciptakan Undang-undang poligami, tetapi hanya mebatasi poligami dengan jumlah tertentu. Al-Qur'an tidak menyuruh poligami, tetapi hanya membolehkannya dengan persyaratan adil. Poligami merupakan solusi dan jaga-jaga (antisipasi), bukan sebaliknya membuat masalah. Jadi sesuaikan

<sup>26</sup> Khairuddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 101-104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi dan keadaan dimana dan kapan poligami ini dibutuhkan. Dan betapapun jeleknya poligami barangkali masih lebih baik bagi masyarakat, perorangan, mapun keluarga daripada penggunaan hak secara membabi buta yang tidak diatur dengan ini.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut tokoh kontemporer, Muhamad Syahrur membolehkan poligami dengan menetapkan adanya syarat kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan. Adapun syarat kualitasnya yaitu istri kedua, ketiga dan keempat yang boleh dinikahi harus janda yang memiliki anak-anak yatim yang kemudian menjadi tanggung jawabnya.<sup>28</sup>

Di lain sisi, Muhammad Abduh berpendapat sebaiknya poligami di jauhi dan dihindari, sesuai dengan kaidah usul fikih yang mengatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat (maslahat).”

Karena menurut realita yang ada bahwa poligami lebih menunjukkan dampak negatif daripada dampak positif dan yang banyak menanggung akibatnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Meskipun tidak menafikan ayat yang membolehkan poligami, namun ia sangat menentang praktik poligami dalam masyarakat, di samping karena sulit merealisasikan keadilan bagi istri,

<sup>27</sup> Ibid., h. 105.

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar Asali, 1990), h. 598-599.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat sulit juga membina masyarakat yang di dalamnya marak praktik poligami, dari sisi lain poligami tidak diyakini dapat menciptakan suasana harmonis, malah sering kali menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.<sup>29</sup> Walaupun Abduh menentang praktik poligami, tapi ia tetap membolehkan poligami pada keadaan yang memaksa seperti tidak dapat mengandung.

Pendapat senada disampaikan juga oleh Masjfuk Zuhdi, menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak resiko/*mudharat* daripada manfaat, karena manusia fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan kehidupan yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu,

<sup>29</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern world*, alih bahasa oleh: Machun Husein (Surabaya: CV Amar Press, 1991), h. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri sedang mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>30</sup>

Dari sisi lain Muhammad Abdul-Rauf berpendapat, poligami Nabi Muhammad harus dilihat dan dipertimbangkan kondisi kapan beliau melakukannya. Ternyata selama 28 tahun dari umur perkawinannya, atau umur 53 tahun, beliau monogami dengan Khadijah. Beliau melakukan poligami sepeninggal Khadijah, dan adanya tuntutan politik dan sosial, yang diikuti juga dengan tuntutan untuk membantu sejumlah penduduk Madinah (ketika itu disebut Yasrib) untuk mencapai ketentraman masyarakat (*civil order*).<sup>31</sup>

Al-Qasimi (W. 1916 M) berpendapat bahwa hanya pria yang istimewa saja yang bisa melakukan poligami secara adil. Sedangkan Al-Maraghi (W. 1952 M) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa poligami hanya diperbolehkan

<sup>30</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, dikutip dari: Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Manakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-2, h. 130-131.

<sup>31</sup> Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 62-63.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan darurat, misalnya karena istri mandul, suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayaninya, suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai kepentingan keluarga dan jumlah perempuan melebihi dari jumlah laki-laki.<sup>32</sup>

Amina Wadud<sup>33</sup> berpendapat bahwa ayat poligami, An-Nisa' (4): 3; *pertama*, ayat ini berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni wali pria yang bertanggungjawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam pengelolaan tersebut. Salah satu pemecahan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahi anak yatim.<sup>34</sup> *Kedua*, menekankan keadilan, yakni mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para istri.

Kaitan dengan An-Nisa' (4): 129 banyak mufassir modern berkesimpulan bahwa monogami sebagai perkawinan yang disukai Qur'an. Mestinya ihwal saling melengkapi antara suami dan istri, membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan ketentraman, tidak mungkin tercapai jika seorang suami

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 90.

<sup>33</sup> Seorang pemikir wanita muslim Amerika, yang menekankan kajiannya pada masalah-masalah wanita, dengan pendekatan hermeneutik. Ia pernah mengajar di Malaysia tentang masalah-masalah yang sama, wanita. Jika ditelusuri Amina adalah seorang tokoh yang sangat gigih memperjuangkan keadilan gender dalam persepektif Islam. Ia berasal dari Nigeria, anak seorang pendeta Kristen, setelah masuk Islam, lalu ia menetap di Libya. Ia pernah mengenyam pendidikan dalam bidang tafsir di Al-Azhar University, Kairo, Mesir.

<sup>34</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Qur'an*, alih bahasa oleh: Yaziar Radianti (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 111-112.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus ayah membagi cinta kepada lebih anak satu keluarga, demikian Amina.<sup>35</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa status hukum poligami menurut beberapa ulama klasik dan ulama kontemporer terdapat perbedaan yang cukup signifikan, dimana para ulama klasik berpendapat bahwa poligami hukumnya boleh dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para istri. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer cenderung membatasi kebolehan poligami, dimana suami hanya boleh berpoligami jika dalam keadaan tertentu saja atau disebut juga dalam keadaan darurat, adapun dalam keadaan normal Islam menghendaki monogami. Di samping itu, sebagian ulama kontemporer justru cenderung mengharamkan poligami.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukum poligami secara garis besar terbagi tiga yaitu: membolehkan poligami, haram poligami dan membolehkan poligami dengan syarat yang ketat.

#### Syarat-Syarat Poligami

Syariat Islam membolehkan poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan golongan tinggi atau keturunan keluarga golongan rendah. Bila

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 114.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.

Dalam suatu riwayat, ketika putri beliau Fatimah binti Muhammad AS akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Dan beliau mendengar rencana poligami ini, beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, berseru:

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ، ثُمَّ لَا آذَنَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا آذَاهَا (رواه البخارى)

Artinya: “Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putraku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putraku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga”. (H.R. Bukhari).<sup>36</sup>

Namun, apakah bolehnya berpoligami itu mutlak untuk semua orang tanpa ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila kita baca surat An-Nisa ayat 3 dan korelasi dengan hadits-hadits lain, seperti hadits tentang pelarangan

<sup>36</sup> Manshur Zuhri, *Membaca kembali Sunnah Poligami* (Modul Perkuliahan Hadits Akkam PMH-V), h. 7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali yang hendak melakukan poligami, serta ancaman Rasulullah SAW bagi seorang suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memerintah, apalagi mewajibkan poligami, dan tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum Muslimin untuk berpoligami. Artinya, seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI Sebagaimana yang berlaku di Indonesia, ternyata juga mengatur tentang syarat poligami. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lain yang perlu mendapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian dari hakim pengadilan.<sup>37</sup>

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 56:<sup>38</sup>

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 57 KHI menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47-48.

<sup>38</sup> Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 166.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada Pasal 59 KHI menerangkan: “dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin tidak beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami adapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam persepektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi ini sejalan dengan kaidah fiqh:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil manfaat (*maslahat*).”

Kendatipun demikian, hukum kebolehan poligami hanyalah sebagai alternatif dan terbatas sampai empat orang istri. Sebagaimana ditegaskan dalam KHI pasal 55. Dan pembatasan poligami maksimal empat orang dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang bersamaan.<sup>39</sup>

#### D. Alasan-alasan Berpoligami

Menurut Achmad Kuzari, kalau mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami ini dilaksanakan dengan berbagai motivasi. Ada di antaranya yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, untuk memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi sebagaimana dikatakan oleh Lee Kuan Yew, yang waktu itu Perdana Menteri Singapura. Motif-motif yang lainnya, seperti misalnya Rasulullah SAW berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menengkan ajaran beliau.<sup>40</sup>

Abu Azzam Abdillah menulis dalam bukunya yang berjudul “Agar Suami Tak Berpoligami”, bahwa alasan biologis<sup>41</sup> bisa menjadi penyebab dilakukannya praktek poligami. Alasan biologis yang dimaksudkan Azzam Abdillah, antara lain:

1. Istri yang Sakit. Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya.

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Granfindo Persada, 1998), cet. Ke-III, h. 176-177.

<sup>40</sup> Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan dikutip dari: Aa Sofyan, “Analisis Pemikiran Maksud Mulia Terhadap Keharaman Poligami”, dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No.1., (2016), h. 10.

<sup>41</sup> Abu Azzam Abdillah, *Agar Suami Tak Berpoligami* (Bandung: Ikomatuddin Press, 2007), h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hasrat Seksual yang Tinggi. Sebagian kaum pria memiliki geirah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.
3. Rutinitas Alami setiap Wanita. Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami rutinitas tersebut, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami menjadi pilihannya.
4. Masa Subur Pria Lebih Lama. Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Pernyataan senada disampaikan oleh Ali Ahmad al- Jarjawi bahwa seorang laki-laki akan tetap mampu memproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di lain sisi terungkap bahwasanya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh atau lima puluh lima tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause.

Rahmat Gakim juga menambahkan bahwa faktor sosial menjadi alasan untuk berpoligami. Adapun faktor sosial yang dimaksudkan Rahmat Gakim, sebagai berikut:

1. Kemampuan Ekonomi. Inilah salah satu faktor poligami yang sering terjadi pada kalangan masyarakat modern sekarang ini, kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, seiring menumbuhkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

2. Banyaknya Jumlah Wanita. Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadinya perang dan banyak laki-laki menjadi korban, akibatnya jumlah wanita lebih banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian sekaligus pemecahannya. Bentuk pemecahan dari masalah tersebut adalah dengan berpoligami.<sup>42</sup>

Demikianlah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, jika penulis simpulkan maka terdapat faktor-faktor yang kerap dijadikan alasan untuk berpoligami yaitu, faktor biologis, faktor internal rumah tangga seperti kemandulan istri, istri yang lemah dan sikap buruk istri, dan faktor sosial (kemampuan ekonomi dan banyaknya jumlah wanita).

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 surat An-Nisa' yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan normal, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang istri dalam Al-Qur'an dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

Namun, untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan

<sup>42</sup> Rahmad Gakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 118.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar masalah mursalah, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak sampai menutup sama sekali pintu poligami. Dalam konteks Indonesia yang mempunyai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan dengan syarat mendapat izin istri/istri-istri yang tedahulu, mampu memberikan nafkah dan dapat berlaku adil.

#### E. Hikmah Poligami

Islam membolehkan poligami bertujuan untuk suatu kemaslahatan yang timbul akibat kondisi kehidupan. Berpoligami bukanlah suatu yang wajib dan juga bukan suatu yang disunnahkan sebagaimana anggapan sebagian orang, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Kebolehan poligami bukanlah suatu pembolehan yang tanpa makna atau hikmah. Walaupun hikmah hakikinya hanya Allah yang tahu, namun para ulama fiqh mencoba untuk mencari tahu dan menuliskan dalam kitab fiqh mereka apa-apa hikmah yang terkandung dalam kebolehan poligami, misalnya Sayyid Sabiq dalam kitabnya berpendapat bahwa poligami mempunyai banyak hikmah, di antaranya:<sup>43</sup>

1. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membatasi sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang istri, akan tetapi dengan syarat sanggup berlaku adil terhadap mereka dalam urusan belanja, tempat

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 179-185.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal seperti yang telah diterangkan di atas. Bilamana ia takut berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan.

2. Adakalanya istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuh, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami istri, padahal suami ingin memiliki anak dan seorang istri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan seperti ini melakukan poligami dianggap sebagai cara yang bisa ditempuh, akan tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memperbanyak populasi umat Islam karena umat Islam tidak akan bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka kuat, memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara, seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan dan unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewibawaan dan kekuatan Negara tersebut.
4. Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Ketimpangan jumlah ini terpaksa memperbolehkan poligami demi melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada. Jika poligami tidak diberlakukan, maka hal itu dapat menjerumuskan perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dan meruntuhkan moral.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause. Karena perempuan tidak bisa diajak melakukan hubungan badan ketika mengalami haid, yang biasa membutuhkan sampai sepuluh hari dan ini berlaku setiap bulan, ketika melahirkan dan mengalami nifas, dimana dia membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari.
6. Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan monogami.

#### F. Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam

Adapun dasar untuk berlaku adil sebagai syarat kbolehkan poligami yang dijadikan para ulama adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 dan 129, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَتَلْتُمْ  
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (QS. An-Nisa’: 129).<sup>44</sup>

Jika dilihat dari kedua ayat di atas, pada ayat 3 surat An-Nisa’ menjelaskan kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun apabila takut tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang wanita saja. Sedangkan pada ayat 129, menjelaskan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sepintas kedua ayat tersebut kelihatannya bertentangan, di satu sisi An-Nisa’ ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat adil, sedangkan pada sisi yang lain An-Nisa’ ayat 129 menafikan kemampuan berlaku adil. Maka, di sini perlu memahami kedua ayat di atas dengan baik dan benar tentu melalui pemahaman para ulama. Ternyata para ulama juga berbeda dalam memahami konsep adil dalam poligami.

Menurut Imam Syafi’i, As-Sarakhasi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.<sup>45</sup> Menurut fiqih Mazhab Syafi’i yang dimaksud dengan pembagian yang seadil- adilnya, ialah dalam hal nafkah (biaya hidup), pakain, tempat tinggal dan waktu bergilir. Sedangkan dalam perkara kecintaan dan kasih sayang, tidak seorang pun dibebani

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 100.

<sup>45</sup> Khairuddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 107.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab soal cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah.<sup>46</sup>

Muhammad Husein Al-Dzahabi mendefenisikan keadilan poligami sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas mampu yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlakukan dalam poligami adalah keadilan materiel seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan materiel istri.

Menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa syariat menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya poligami, diantaranya kesanggupan untuk berlaku adil terhadap para istri. Keadilan yang dimaksud az-Zuhaily adalah keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku adil terhadap istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Namun jika khawatir akan berlaku zalim atau tidak mampu berlaku adil di antara para istri maka cukup memiliki satu istri saja.<sup>47</sup> Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَمَالَ إِلَى أَحَدِهِمَا فِي الْقِسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَحَدُ شَاقِيهِ مَائِلًا . ( رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجه و أحمد ).

<sup>46</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 328.

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, alih bahsa oleh: AbdulHayyie dkk, *Fiqh Islam 9* ( Jakarta: Gema Insan, 2011), Cet. Ke-1, h. 162.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dari abu hurairah, dari nabi Saw, beliau bersabda, barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih berat kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan salah satu bahunya jatuh atau miring.”*(HR. imam yang lima)<sup>48</sup>

Keadilan yang dimaksud sebagai syarat poligami bukanlah sama rata dalam perasaan, cinta dan kecenderungan hati. Karena itu adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci. Akan tetapi, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksi. Oleh karena itu, syariat mengingatkannya di dalam surat An-Nisa’ ayat 129. Ayat tersebut menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman terhadap istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus sebagai perempuan yang diceraikan, demikian az-Zuhaili.<sup>49</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil danimbang, maka haram baginya menikahi lebih dari

<sup>48</sup> Manshur Zuhri, *Membaca kembali Sunnah Poligami* (Modul Perkuliahan Hadits Ahkam PMH-V), h. 15

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 164.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang.<sup>50</sup>

Sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi di atas, Sayyid Sabiq pun memaknai adil yang dituntut dalam poligami ialah dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan yang tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir suami berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak para istri, maka diharamkan poligami.<sup>51</sup> Dan Sayyid termasuk ulama yang tidak setuju jika syarat keadilan dalam poligami harus dimaknai adil dalam hal cinta dan kasih sayang karena itu di luar kemampuan seseorang.

Berbagai pendapat di atas, para ulama cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Berbeda dengan Muhammad Abduh yang berpandangan bahwa keadilan yang disyaratkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta dan perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur'an mengatakan: “ Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, maka kawinlah satu istri saja..” (QS. An-Nisa (4): 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusak struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah saling menyayangi antara anggota

<sup>50</sup> Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Muammal Hamidy (Singapura: PT Bina Ilmu, 1993), h. 260-261.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 171.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarganya.<sup>52</sup>

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami lebih tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.<sup>53</sup>

Muhammad Musthafa Al-Maraghi berpendapat bahwa yang terpenting ialah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun perkara di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan. Yaitu kemampuan hati untuk membagi kasih sayang yang sama rata kepada setiap istri.

Pendapat Muhammad Musthafa Al-Maraghi di atas tidak jauh berbeda dengan ulama tafsir asal Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang memaknai adil dalam poligami dalam hal materiel saja. Sedangkan keadilan immateriel sebagaimana yang dimaksudkan surat An-Nisa' ayat 129 tidak mungkin tercapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami

<sup>52</sup> Ali Ahmad Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-fikri, t.t), h. 10-

<sup>53</sup> Abdul al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktabah al-Tariyyah, 1969), h. 239.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai.<sup>54</sup>

Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi biasanya bersandar pada ayat 129 surat An-Nisa' yang menegaskan “*kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat mengendaki demikian*”. Namun dengan ayat ini pula kelompok yang lain memaknai keadilan dalam poligami menyangkut aspek immateri (seperti kasih sayang) menyandarkan pendapatnya. Menurut kelompok ini, karena keadilan poligami sangat sulit diwujudkan maka hal tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya poligami tidak dianjurkan dalam Islam. Pendapat yang demikian dinyatakan oleh Muhammad Thaha dan Fazlurrahman.

Menurut Muhammad Thaha, keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati. Sedangkan Fazlurrahman berkomentar berkaitan dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 3 yang menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil. Ayat ini juga diikuti penegasan “*jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, cukuplah hanya dengan seorang istri*”, selanjutnya pada surat An-Nisa' ayat 129 ditegaskan bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat menghendaki demikian. Dengan demikian, menurut Rahman bahwa Al-Qur'an sebenarnya

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 201.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah menegakkan monogami, atau menyelamatkan ayat 3 An-Nisa' dan 129 dari pengertian yang kontradiktif.

Dari berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa sebagian besar ulama memaknai keadilan sebagai syarat dalam perkawinan poligami adalah pada hal-hal yang bersifat material dan terukur seperti pembagian tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, waktu bergilir, belanja bulanan dan hal lainnya yang bersifat material. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, as-Sarakhasi, al-Kasani, Muhammad Husein al-Dzahabi, Mustafa al-Siab'i, Wahbah az-Zuhaili, Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri, dan M. Quraish Sihab. Hal ini menjadikan poligami lebih mudah dilakukan atau poligami menjadi sistem perkawinan yang bisa terealisasikan di dalam kehidupan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal kualitatif atau dalam bahasa M. Quraish Shihab keadilan Immaterial seperti perhatian, cinta dan kasih sayang, sebagaimana halnya yang dikemukakan Muhammad Abduh, Muhammad Thaha dan Fazlur Rahman di atas, maka poligami menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat Al-Barqarah ayat 286. Yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap ketetapan hukum yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril as sebagai pedoman hidup manusia merupakan suatu ketetapan yang bisa untuk dijalankan, terlepas ada sebagian manusia yang menganggap berat atas ketetapan hukum tersebut.

Jadi, dari banyaknya pendapat para ulama yang memberikan konsep adil dalam poligami, maka penulis hanya terfokus membahas tentang pendapat para ulama yang mayoritas yaitu adil dalam hal materil saja. Mengenai pendapat ulama yang memaknai adil dalam hal immateriel penulis hanya melakukan perbandingan saja. Jadi konsep adil yang dikemukakan oleh mayoritas ulama dalam hal meteril dapat di kelompokkan kedalam 3 pembagian yaitu:

- a. Hak Atas Pembagian Nafkah (pakaian dan biaya hidup)

Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istrinya baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, dari keturunan bangsawan dengan yang berasal dari golongan bawahan. Jika masing-masing istri memiliki anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, maka hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Apabila



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami khawatir tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.<sup>56</sup>

Setiap suami wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya, sesuai dengan kesanggupannya. Memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang suami. Dan juga memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama bagi seorang suami. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>57</sup>

Nafkah (Arab: *an-Nafkah*: pengeluaran). Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap para istri dan anak-anaknya, terutama dalam hal primer seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan pendidikan.

Adapun soal besaran nafkah, ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat, besaran nafkah tidak ditetapkan secara syariat. Ia dikembalikan kepada tempat, waktu, kemampuan suami, dan kebutuhan istri. Sementara Imam Syafii menyatakan sebaliknya. Besaran nafkah ditetapkan oleh syariat, yaitu dua mud (1 mud ialah 543 gram) bagi suami yang berkecukupan, satu setengah mud bagi suami kalangan menengah, dan satu mud bagi suami yang miskin. Namun rupanya besaran yang ditetapkan oleh Imam Syafii hanya berupa

<sup>56</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 90

<sup>57</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 383.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan. Sedangkan yang lain tidak ditentukan.<sup>58</sup>

Ada pula yang berpendapat, besaran nafkah tidak ada dibatasi kecuali batas kecukupan. Sedangkan kecukupan dikembalikan kepada adat kebiasaan. Suami tidak perlu memaksakan diri di luar kemampuannya. Yang penting sudah berusaha maksimal memenuhi kewajiban nafkah.<sup>59</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S At-Thalaaq(65): 7).<sup>60</sup>

Kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang laki-laki, istri mendudukkan posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja. Sebagaimana di sebutkan Syekh Musthafa Al-Khin dalam kitabnya:

يقدم بعد نفسه: زوجته، لأن نفقتها أكد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأصول والفروع، فإنها تسقط بمضي الوقت.

<sup>58</sup> Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imamis Syafi'i*, jilid IV, h. 173.

<sup>59</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 11* (Semarang: As-syifa', 1990), 462.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 89



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Setelah dirinya, suami harus mendahulukan istrinya. Menafkahinya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu.”*

Jadi, Setelah diri dan istrinya, posisi orang yang harus dinafkahi seorang laki-laki adalah anaknya, kemudian ibunya yang tidak mampu, kemudian ayahnya yang tidak mampu, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu, kemudian kakeknya yang tidak mampu.<sup>61</sup>

Saking besarnya hak nafkah, sampai-sampai seorang istri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya. Hal itu didasarkan pada hadits riwayat Hindun binti ‘Utbah. Ia pernah mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW,:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ -إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *“Dari'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi*

<sup>61</sup> Musthafa Al-Khin, *Op Cit.*, h. 178.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku Nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik."* (H.R. Muttafaq Alaihi).<sup>62</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, karena kebutuhan istri berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Persamaan bagi para istri dalam kaitannya dengan biaya hidup dan pakaian bukan merupakan suatu kewajiban apabila suami telah menyediakan kebutuhan- kebutuhan pokok bagi setiap orang istrinya. Begitu pula dengan tunjangan- tunjangan yang bersifat pribadi bukan merupakan persyaratan menurut hukum islam, namun bila suami memutuskan untuk memberikan tunjangan tersebut kepada salah seorang istrinya, maka dia harus memberikan tunjangan serupa kepada istri-istrinya yang lain. Demikian juga halnya, hadiah-hadiah harus diseimbangkan. Namun pengeluaran uang untuk keperluan anak-anak tidak termasuk dalam pembagian harta diantara para istri, karena itu

<sup>62</sup> Ibnu hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadist yang ke 1171.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia wajib diberikan tanpa memperdulikan apakah salah seorang istri mempunyai tujuh orang anak dan istri lainnya mempunyai dua orang anak.<sup>63</sup>

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan lainnya kepada istri-istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan.

#### b. Pembagian Waktu Bergilir

Suami yang mempunyai istri lebih wajiblah mengatur giliran dengan adil kepada istri-istrinya itu. Kalau suami tidak dapat mengatur giliran dengan adil, hendaklah ia beristri tidak lebih dari seorang, kecuali kalau dengan suka dan rela hati dari istri yang bersangkutan. Dengan persetujuan istri-istrinya dapatlah suami mengatur giliran tersebut sebagaimana mestinya, misalnya sama-sama satu, dua atau tiga malam untuk masing-masing istri.<sup>64</sup>

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istrinya ialah pembagian giliran. Menurut Hukum Islam pembagian waktu bergilir dilakukan berdasarkan malam, karena waktu malam adalah waktu istirahat, dimana seorang suami yang menikah lebih dari seorang istri harus membagi malamnya diantara para istrinya, sedangkan siang

<sup>63</sup> Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligini Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 86.

<sup>64</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut mazhab syafi'i, hanafi, maliki, hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 99.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan suami untuk mencari nafkah.<sup>74</sup> Dalam hal mencari nafkah Pembagian malam dan siang ini ditetapkan dan diatur oleh Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam Al- Quran:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ.

Artinya: “Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”. (Q.S Yunus: 67)<sup>65</sup>

Dalam pengaturan waktu bergilir, bila suami meninggalkan rumah istrinya di siang hari gilirannya tidak untuk keperluan bekerja dan suami segera pulang maka dia tidak perlu mengatur kembali waktu giliran. Namun apabila suami berpergian ke suatu tempat dalam jangka waktu lama atau tidak kembali pada waktu itu (waktu giliran) maka waktu bergilirannya harus diatur kembali sebab berpergian akan menghilangkan hak istri itu (istri yang mendapat waktu giliran).

Jika suatu waktu suami berpergian dan dia memerlukan ditemani salah seorang dari istri-istrinya, dia berhak untuk memilih satu diantara mereka. Apabila hal itu ditolak oleh istri-istri yang lain dan timbul sengketa, hendaklah suami mengundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*., hal. 290.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menemaninya. Hal seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan cara undian untuk menemaninya dalam perjalanan.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: “Rasulullah SAW apabila hendak bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa undiannya yang keluar, beliau keluar bersamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

Namun sebaliknya apabila suami berbuat aniaya terhadap salah seorang dari mereka dengan mengabaikan malam bagiannya, wajiblah ia menggantikannya dengan malam lainnya, karena itu suami harus mengerti aturan-aturan agama yang berkaitan dengan pembagian hari bagi para istri.

Namun apabila diantara kedua belah pihak telah terjadi perdamaian, dimana istri yang satu telah merelakan haknya untuk dimiliki istri yang lain maka dengan sendirinya keadilan itu tidak wajib lagi, dan suami tidaklah berdosa lagi kalau keadilan itu tidak diisinya. Hadits Rasulullah SAW, menyatakan:

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- ( أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

<sup>66</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Jilid I* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), h. 618.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Artinya:** “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Saudah Binti Zam'ah pernah memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberi giliran kepada 'Aisyah pada harinya dan pada hari Saudah”. (H.R. Muttafaq Alaihi.)<sup>67</sup>

Adil dalam pembagian waktu bergilir ini kerap kali menjadi persoalan yang bisa membuat rumah tangga berantakan. Maka para suami yang melakukan poligami ini sangat diuntut agar bisa mebagi waktu bergilir ini seadil-adilnya, jika istri yang satu mendapat satu malam, maka suami juga harus menggilir istri lainnya satu malam. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا اَمْلِكُ، فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ. (رواه الاربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي ارسله).

**Artinya:** “Dari Aisya ra, ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Dan bersabda: “ya Allah, inilah adalah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dengan yang tidak aku miliki.” (HR. Al-Arba’ah. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. At-tirmidzimenilainya sebagai hadis mursal).<sup>68</sup>

Mengenai hal pembagian waktu bergilir ini, Jumhur Ulama’

<sup>67</sup> Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadist yang ke 1066/1597.

<sup>68</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, alih bahasa oleh: Ali Fauzan dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 535.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa jika suami yang sudah beristri dan menikah lagi dengan seorang gadis perawan, maka ia boleh tinggal dirumah istri muda selama tujuh hari, dan kemudian tinggal sesuai giliran masing- masing istri. Sedangkan apabila istri muda berstatus janda, maka ia boleh menginap di tempatnya selam tiga hari, dan setelah itu ia harus tinggal sesuai giliran masing-masing.<sup>83</sup> Hadits Rasulullah SAW, menyatakan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. (متفق عليه، واللفظ للبخاري).

Artinya: “Dari Anas r.a., ia berkata”sebagian sunnah nabi SAW. ialah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis sesudah yang janda, bolehlah ia tinggal padanya selama tujuh malam, dan apabila ia mengawini perempuan yang sudah janda, bolehlah ia tetap padanya selam tiga hari, dan seterusnya diadakan giliran.”( H.R Bukhari dan Muslim).

Adapun hikmah tujuh malam untuk gadis dan tiga malam untuk janda ialah karena yang perempuan masih gadis itu masih banyak malunya untuk dipergauli. Oleh sebab itu, ia diberi hak agar suaminya bermalam selama tujuh malam hingga hilang perasaan malunya terhadap suaminya. Adapun perempuan janda tidaklah selalu perempuan yang masih gadis dan dengan cepat dapat dibawa bergaul dalam rumah tangga.

Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang masih gadis merdeka atau budak muslimah maupun ahlul kitab dan ia masih mempunyai istri lain yang merdeka maupun budak, maka ia harus





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pengkhususan kepada istri yang masih gadis itu dengan menginap ditempatnya selama tujuh hari. Kemudian ia memberikan giliran kepada yang lainnya, tanpa menghitung ketujuh hari tersebut.<sup>69</sup>

Ada beberapa pendapat tentang tinggalnya suami ditempat gadis dan janda, apakah ia harus menghitung tinggalnya atau tidak, jika dia memiliki istri lagi: Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal dan para pengikut mereka berdua, berpendapat bahwa tinggal ditempat istri yang masih gadis selama tujuh hari dan ditempat istri yang sudah janda selama tiga hari dan tidak menghitungnya dengan hari-hari yang dahulu dia menikah, jika dia memiliki istri lagi. Abu Hanifah berpendapat tinggal ditempat istri-istri tersebut secara sama, baik gadis atau janda dan menghitungnya dengan hari ketika dia tinggal ditempat istrinya, jika ia memiliki istri lagi. Sedangkan para pengikut Malik berbeda pendapat tentang apakah tinggalnya suami ditempat gadis selama tujuh hari dan ditempat janda selama tiga hari hukumnya wajib atau sunnah, Menurut Ibnu Al Qasim mengatakan hukumnya adalah wajib sedangkan menurut Ibnu Abdil Hakam mengatakan sunnah.<sup>70</sup>

#### c. Pembagian Tempat Tinggal

Setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah SWT berfirman dalam Surat Al Ahzab:

<sup>69</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 48.

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 111-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab(33): 33)

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan rumah Nabi SAW dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu. Sedangkan maksud dari “kamu” disini adalah isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. Perintah Ini juga meliputi segenap mukminat.

Ibnu Qudamah Rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al Mughni bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridha dari keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadikan penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya.

Namun jika para istri ridha apabila mereka dikumpulkan dalam satu rumah, maka tidaklah mengapa. Bahkan jika keduanya ridha jika suami mereka tidur diantara kedua istrinya dalam satu selimut tidak mengapa. Namun seorang suami tidaklah boleh menggauli istri yang satu di hadapan istri yang lainnya meskipun ada keridhaan diantara keduanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dijelaskan juga oleh Mahmud Yunus dalam hukum perkawinan menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dalam pasal 75 tersebut dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman untuk istrinya serta perkakas rumah, seperti tempat tidur, kain selimut, bantal dan sebagainya.

Disebutkan juga oleh Jamilah Jones yang berpendapat dalam islam lebih disukai bila setiap orang istri mendapatkan tempat tinggal tersendiri dimana suami dapat mengunjunginya, karena begitulah cara Rasulullah membagi waktu bergilirnya. Disini tidak ada perbedaan apakah rumah itu besar atau kecil, dengan satu dapur, satu kamar mandi dan fasilitas lainnya, karena tinggal bersama bisa menimbulkan keberatan bagi mereka dan kecemburuan alami mungkin sekali timbul diantara mereka.

Dalam KHI bab X11 tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 82 ayat (1) bahwa "suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Disebutkan juga dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 32 ayat (1) bahwa "suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap" dan ayat (2) "rumah tempat kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama".

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya seseorang yang beristri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal bagi setiap istrinya.

Kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan sehingga menimbulkan ketidak adilan, karena seperti yang dijelaskan diatas tinggal bersama dengan beberapa orang istri bisa menimbulkan keberatan bagi mereka dan kecemburuan alami yang mungkin sesekali timbul diantara mereka. Kecuali pihak (istri-istri) memiliki pemahaman sendiri untuk tetap hidup rukun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN****KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami oleh pasangan poligami di Desa Kualau Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang melakukan poligamai, maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan konsep adil dalam poligami yang dilakukan oleh Pasangan Poligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak secara keseluruhan di terapkan oleh suami yang berpoligami yaitu YH, AS dan SJ yang mana mereka lebih cenderung kepada istri keduanya sedang kan MR lebih cenderung kepada istri pertamanya, selanjutnya cuma SJ yang bisa menerapkan konsep adil secara keseluruhan terhadap istri-istrinya. Maka dari itu mayoritas suami yang berpoligami di desa kulau tidak bisa menerapkan konsep adil secara keseluruhan.
2. Tinjauah hukum Islam terhadap penerapan konsep adil dalam poligami yang di terapkan oleh pasangan poligami di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisis penulis di atas maka suami yang melakukan poligami di desa kulau tidak sesuai dengan konsep adil menurut hukum islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SARAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak yang akan melakukan poligami atau kepada pembaca sekalian

1. Kepada para suami yang ingin berpoligami agar berpikir ulang untuk melakukan poligami, karena akan berdampak besar kepada kehidupan yang akan datang dalam rumah tangga.
2. Kepada para istri yang di poligami kalau suami anda menikah di bawah tangan maka anda berhak mengajukan tuntutan di pengadilan agama.
3. Laki-laki yang melakukan poligami agar tidak terlalu cenderung kepada istri yang lebih muda, karena istri yang lebih tua merupakan pendamping hidup yang benar-benar mengerti anda.
4. Kepada istri-istri yang dipoligami hendaknya memberikan syarat, agar setelah suami menikah lagi para istri-istri tetap mendapatkan perhatian dari suami, dan berusaha menjadi istri idaman yang tidak layak untuk dipoligami.
5. Kepada para suami yang melakukan poligami agar benar-benar bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya sehingga terbangunlah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* di dalam keluarga yang berpoligami.
6. Sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas tentang syariat Islam dalam berlaku adil terhadap istri-istri yang di poligami.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- M. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami* (Solo: Mumtaza, 2008),
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2, ahlih bahasa oleh: ImamGhazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Ibal Jasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),
- Bambang Prasetyo. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).cet ke-6.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Sinar Baru Van Haove, 1984).
- WJS. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Depdiknas, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet.Ke-III.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Surabaya: Al-hidayah, 2002).
- Pius A. Partano dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994).
- Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015).



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996),.

Al-Sarakhsi, *Al-Mabasut* dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Pekanbaru: Suska Press, 2015).

Al-Imam 'Ala ad-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Kitab Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, cet. Ke-I dikutip dari: Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015).

Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah Naungan Al-Qur'an Juz IV*, alih bahasa oleh: As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), h. 274-282 (cek ulang).

Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah* (Bandung: Pustaka Iran, 2007).

Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Damaskus: DarAhali, 1990).

J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern world*, alih bahasa oleh: Machun Husein (Surabaya: CV Amar Press, 1991).

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, dikutip dari: Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-2.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* (Pekanbaru: Suska Press, 2015).

Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Qur'an*, alih bahasa oleh: Yaziar Radiani (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Granfindo Persada, 1998), cet. Ke-III.

Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan dikutip dari: Aa Sofyan, "Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami", dalam *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1., No.1., (2016).

Abu Azzam Abdullah, *Agar Suami Tak Berpoligami* (Bandung: Ilomatussunn Press, 2007).

Rahmad Gakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, ahli bahasa: AbdulHayyie dkk, *Fiqh Islam 9* ( Jakarta: Gema Insan, 2011).

Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa oleh: Muammal Hamidy (Singapura: PT Bina Ilmu, 1993).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali Ahmad Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-fikri, t.t).
- Abdul al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzhahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah, 1969).
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Musthafa Al-Khin, *Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imamis Syafi'i*, jilid IV.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 11* (Semarang: As-syifa', 1990).
- Jamilah Jones, *Monogami Dan Poligini Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut mazhab syafi'i, hanafi, maliki, hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah Jilid I* (Bairut: Daral-Fikr, 1995)
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram* Jilid 3, alih bahasa oleh: Ali Fauzan dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 5, diedit dalam  
 Ifah Qanita, *Poligami Berkah atautkah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016)  
 Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan, Undang-undang No.  
 1 Tahun 1974*,

Reza Fitra Ardhian, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif  
 Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal  
 Ilmiah: Solo, Universitas Sebelas Maret, 2015.

Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligai* (Bandung: Rosdakarya, 1995).

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press, Jakarta:  
 1995).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia,  
 2008).